

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, mendorongnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan berperan penting di dalam proses pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat, serta dapat mewujudkan stabilitas nasional disebut dengan Usaha Mikro Kecil menengah. Untuk strategi UMKM bisa dilihat mempunyai posisi yang strategis, dikarenakan bisa menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya dan berpotensi besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Usaha Mikro Kecil Menengah membutuhkan strategi pengelolaan keuangan, dimana strategi tersebut dibuat agar UMKM tersebut dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan produktivitas usahanya. Dengan menyusun laporan keuangan tiap periodenya agar mengetahui perkembangan usaha dari waktu ke waktu merupakan salah satu upaya untuk pengelolaan keuangan. Dari Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) pada UMKM di Kecamatan Batam Kota Kota Madya Batam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Entitas belum mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu :

- a. Pengelola entitas belum mengetahui tentang adanya SAK-EMKM yang mengatur standar laporan keuangan untuk entitas yang mereka kelola atau usaha yang mereka jalankan.
 - b. Keterbatasan sumber daya manusia dari pengelola entitas, karena pada umumnya manajemen keuangan usaha masih ditangani sendiri.
 - c. Keterbatasan waktu dalam pengelolaan keuangan usaha, karena selain harus mengelola keuangan pemilik entitas juga harus mengontrol kinerja karyawan dan perkembangan usahanya dari waktu ke waktu.
2. UMKM belum menerapkan SAK-EMKM karena belum menyusun laporan keuangan sesuai standar dalam SAK-EMKM yang memuat komponen-komponen laporan keuangan, yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
 3. Entitas belum melakukan prosedur pembukuan dalam akuntansi yang dikenal dengan istilah penjurnalan/pencatatan, pengelompokan transaksi dalam buku besar, dan pengikhtisaran transaksi.
 4. Pembukuan yang dilakukan pada UMKM masih sebatas laporan bisnis yang merupakan laporan yang disusun tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, tapi entitas menganggapnya sebagai laporan keuangan. Laporan tersebut disusun berdasarkan kreatifitas sendiri dari masing-masing pengelola entitas dalam mengatur keuangan usaha yang dijalankan. Meskipun laporan yang disusun belum mengarah pada pembukuan sesuai standar akuntansi, namun pengelola atau pemilik entitas selalu memperhatikan ketelitian dan ketertiban

dalam bertransaksi, yaitu dengan menggunakan nota sebagai bukti transaksi yang dilakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan implikasinya, maka dari itu penulis ingin memberikan beberapa saran:

1. Perlu adanya pelatihan untuk cara penyusunan pembukuan akuntansi UMKM dari pihak Dinas Koperas agar pelaku UMKM mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar.
2. Pengelola entitas sebaiknya memperhatikan tentang pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar agar dapat memberikan kemudahan dalam mengawasi dan mengontrol kelangsungan usaha dan dapat menjadikan untuk bahan pertimbangan yang tepat dalam mengambil keputusan atau kebijakan.
3. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM sebaiknya berperan serta sebagai penghubung antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan pemilik UMKM untuk mensosialisasikan adanya SAK-EMKM agar pengelola entitas kedepannya dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar.
4. Pengelola entitas sebaiknya menyediakan sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola keuangan usaha tersebut agar dapat menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar, serta dapat membantu pemilik untuk menetapkan kebijakan akuntansinya.